

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sumber pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan. Penjelasan dari sisi penawaran, pertama, menghitung kontribusi pertumbuhan input terhadap pertumbuhan output, kemudian bagian yang tersisa dari pertumbuhan output diakui sebagai laju pertumbuhan teknologi. Demikian pula, setelah memperhitungkan kontribusi permintaan domestik dan permintaan luar negeri, dapat dihitung tingkat pertumbuhan teknologi yang didorong oleh pertumbuhan permintaan dalam negeri dan luar negeri. Dimana $C + I + G$ adalah permintaan domestik dan $X - M$ adalah permintaan luar negeri neto (Mert, 2017).

Pertumbuhan ekonomi bisa dipakai untuk mengukur perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang didefinisikan sebagai peningkatan output per orang. Pertumbuhan ekonomi menjadi bagian penentu kesejahteraan ekonomi yang paling penting. Hal ini mengartikan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari peningkatan output per kapita dalam jangka panjang, juga menjadi alternatif konsumsi barang dan jasa, dengan diiringi peningkatan daya beli masyarakat. Impor dan ekspor merupakan bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi untuk negara maju dan negara berkembang. Tingkat investasi merupakan faktor fundamental bagi pertumbuhan ekonomi untuk menilai kinerja ekonomi sebuah negara. Investasi dalam negeri dikaitkan dengan perubahan modal untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Agar diperoleh pertumbuhan ekonomi yang tangguh, diperlukan peranan pemerintah melalui mengeluarkan kebijakan yang tepat yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satunya adalah pengeluaran pemerintah (Indana & Mulyani, 2021).

Isu pertumbuhan ekonomi dapat diringkas menjadi masalah jangka panjang dari menghasilkan barang dan jasa suatu negara. Selaras dengan teori Keynes (1936) dalam penelitian Azwar tahun 2016 tentang pendapatan nasional Aliran pendapatan empat sektor dikenal sebagai ekonomi terbuka.

Sektor rumah tangga, sektor korporasi, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri merupakan empat sektor ekonomi. Dalam perekonomian empat sektor, ikatan dengan luar negeri disederhanakan dengan mekanisme ekspor impor. Dasar teori dari perekonomian terbuka ditunjukkan dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G + (X-M)$. Seperti terlihat dari rumus di atas, perubahan pada pengeluaran pemerintah akan berpengaruh kepada perubahan pendapatan nasional. Beberapa pertimbangan menjadi dasar keputusan pemerintah dalam mengelola pengeluarannya (Azwar, 2016).

PDB (Produk Domestik Bruto) ialah satu diantara indikator yang berguna melihat kondisi ekonomi sebuah negara. PDB terdiri dari total nilai tambah sebuah negara yang diperoleh semua unit yang berada di negara itu. Berikut kontribusi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pulau di Indonesia dalam pembentukan PDB :

Tabel 1. Kontribusi Pulau dalam Pembentukan PDB Tahun 2016-2020 (Persentase)

Tahun	Pulau Sumatera	Pulau Jawa	Pulau Kalimantan	Pulau Sulawesi	Pulau Bali dan Nusa Tenggara	Pulau Maluku dan Papua
2016	22,03	58,49	7,85	6,04	3,13	2,46
2017	21,66	58,49	8,20	6,11	3,11	2,43
2018	21,58	58,48	8,20	6,22	3,05	2,47
2019	21,32	59,00	8,05	6,33	3,06	2,24
2020	21,36	58,75	7,94	6,66	2,94	2,35

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Dalam Tabel 1. dapat dilihat bahwa PDRB Pulau Jawa berperan sangat besar dalam pembentukan PDB Indonesia jika disandingkan dengan pulau lainnya. PDRB Pulau Jawa menyumbang 58,49 persen pada 2016, 58,49 persen pada 2017, 58,48 persen pada 2018, 59 persen pada 2019, dan 58,75 persen pada 2020. Pulau Jawa selalu menyumbang diatas dari setengah PDB Indonesia. Hal tersebut menunjukkan kondisi perekonomian di Pulau Jawa yang sangat baik sehingga menciptakan angka yang tinggi dibandingkan dengan pulau lainnya. Meskipun terjadi pandemi Covid pada tahun 2020 dan

menyebabkan setiap provinsi di Pulau Jawa mengalami penurunan PDRB, namun kontribusi Pulau Jawa atas PDB tetap di atas angka 50 persen.

Kesenjangan kontribusi antarpulau dalam pembentukan PDB Indonesia ini terjadi dikarenakan Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian di Indonesia dengan penyumbang terbesar berasal dari Provinsi DKI Jakarta, kemudian disusul Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Salah satu program pemerintah pusat menepatkan Pulau Jawa sebagai KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang memberikan fasilitas ke akses pasar global untuk memaksimalkan kegiatan ekspor, impor, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Tingginya angka kontribusi pulau Jawa terhadap PDB Indonesia juga dikarenakan banyaknya penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Pulau Jawa. Pulau Jawa dinobatkan sebagai salah satu pulau dengan penduduk terpadat di dunia dan sebanyak 56 peren penduduk Indonesia bermukim di Pulau Jawa. Sebagai pusat perekonomian, Pulau Jawa mempunyai potensi yang besar dalam memikat investor untuk berinvestasi di Pulau Jawa. Dengan berjalannya investasi dalam negeri, pengeluaran pemerintah, ekspor, serta impor yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.

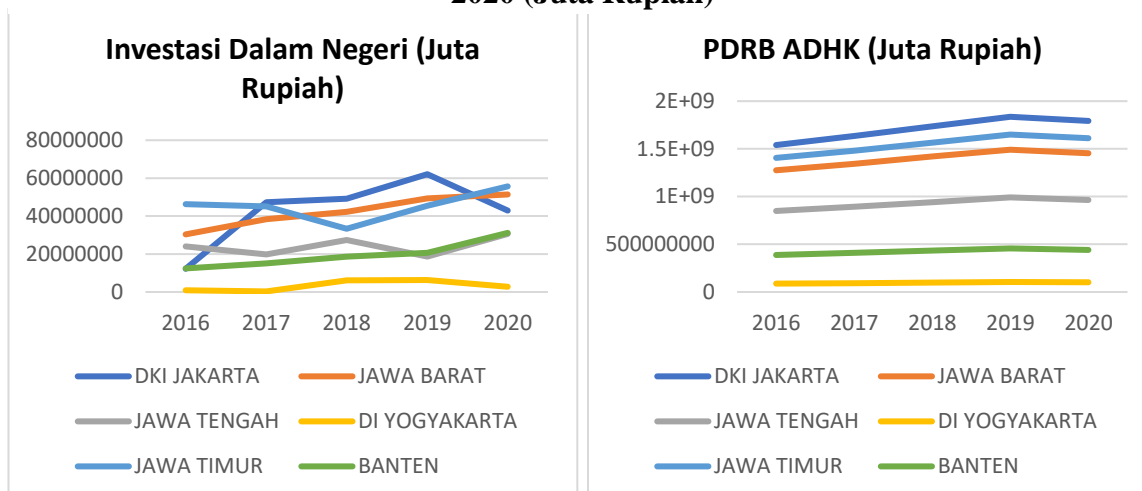
Pulau Sumatera ialah penyumbang kedua terbesar terhadap PDB Indonesia. Perekonomian di Pulau Sumatera didominasi oleh gas dan panas bumi, sektor pertanian dan pertambangan minyak. Meskipun didominasi oleh pertambangan minyak, gas dan panas bumi namun terjadi perlambatan dalam pertumbuhannya, sedangkan pertanian didominasi oleh perkebunan sawit dan karet dengan potensi yang besar. Pulau Jawa didominasi oleh industri besar seperti industri pengolahan yang juga memegang sekitar 52 persen industri pengolahan nasional. Pulau Kalimantan mengandalkan sektor primer dalam perekonomiannya. Sektor pertanian mendominasi di Kalimantan Barat dan Tengah, sedangkan pertambangan dan penggalian mendominasi di Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Pada Pulau Sulawesi, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian. Sektor lain yang menjadi penyumbang terbesar ialah reparasi mobil dan sepeda motor, sektor perdagangan, manufaktur, serta konstruksi. Pada Pulau Bali dan Nusa Tenggara didominasi oleh sektor

pariwisata melalui deversifikasi produk wisata, perluasan daerah wisata dan perkembangan guna meningkatkan daya saing pariwisata. Sedangkan Pulau Maluku dan Papua didominasi oleh pertambangan biji logam seperti produksi biji emas, biji nikel dan biji perak di Maluku dan produksi tembaga dan emas di Papua.

Berdasarkan hal tersebut, pertumbuhan PDRB yang tinggi di Pulau Jawa semestinya mempunyai pertumbuhan ekspor impor yang tinggi pula dikarenakan kemudahan akses ekspor impor di Pulau Jawa, namun pada realitanya ekspor impor di Pulau Jawa tidak selalu mengalami kenaikan. Fenomena tersebut yang menjadi dasar untuk peneliti memilih Pulau Jawa sebagai objek penelitian. Selain ekspor impor, ada pula investasi yang tidak selalu mengalami kenaikan dan cenderung mengalami fluktuasi padahal pulau Jawa merupakan pusat perekonomian nasional dan mempunyai iklim investasi yang baik. Meskipun PDRB di Pulau Jawa tinggi namun pengeluaran pemerintah di Pulau Jawa tak berkesinambungan dengan PDRB di Pulau Jawa.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penting untuk memahami pengaruh pertumbuhan lokal. Investasi ialah salah satu unsur yang mempengaruhi pertumbuhan suatu daerah. Dari perspektif sumber pembiayaan, sumber pendanaan dalam negeri harus menjadi sumber pendanaan utama, terutama dari perspektif pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, sebuah negara harus didasarkan pada investasi dan pembiayaan domestik. Investasi dalam negeri pada infrastruktur publik seperti jalan, sambungan saluran pembuangan, listrik dan pembangkit listrik, pendidikan, kesehatan, dan proyek komunikasi memainkan peran penting guna menaikkan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Investasi memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan dengan memperkaya tingkat produktivitas (Saleem & Zaheer, 2018). Berikut grafik investasi dalam negeri di Pulau Jawa :

Grafik 1. PDRB ADHK dan Investasi Dalam Negeri di Pulau Jawa Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Dalam grafik 1 terdapat fenomena pada tahun 2018 dimana investasi dalam negeri di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan dikarenakan adanya transisi perizinan ke sistem perizinan terpadu daring, namun tidak disertai dengan penurunan PDRBnya. Fenomena selanjutnya pada tahun 2020 investasi dalam negeri provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Banten mengalami kenaikan disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadi pembatasan akses di berbagai negara namun PDRB masing-masing provinsi tersebut mengalami penurunan. Kedua fenomena tersebut diduga bertolakbelakang dengan teori yang dikemukakan oleh Harrod Domar yang menyebutkan syarat yang harus ditempuh guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tangguh yaitu perlunya investasi (Kambono & Marpaung, 2020).

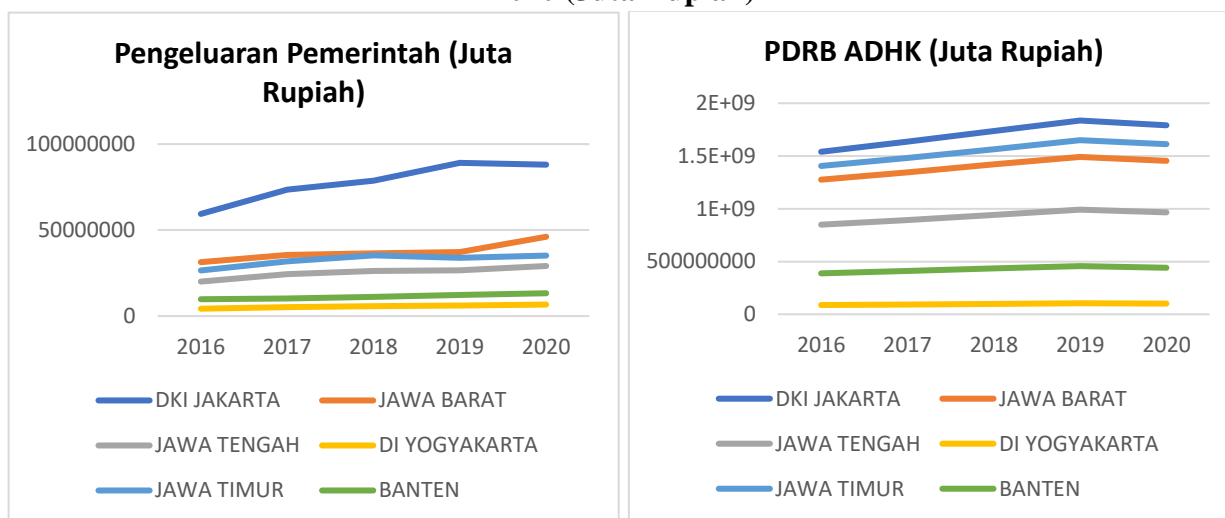
Jika melihat realisasi investasi dalam negeri berdasarkan tempat, dalam kurun tahun 2016 hingga 2020 Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Banten selalu masuk dalam 5 besar penyumbang investasi dalam negeri secara nasional. Pada DKI Jakarta investasi dalam negeri mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga 2019 tetapi mengalami penurunan pada 2020 dikarenakan pandemi Covid-19. Pada Jawa Barat menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2017 hingga 2020. Peningkatan investasi Jawa Barat tercatat 10,1% pada 2018, 16,5% pada 2019, dan 4,3% pada 2020. Investasi dalam negeri Provinsi Jawa Timur mengalami pertumbuhan

signifikan dengan disokong oleh sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi. Investasi dalam negeri Provinsi Jawa tengah mengalami fluktuasi sepanjang 2016 hingga 2020 dengan didominasi oleh sektor listrik, gas dan air, industri makanan, dan lainnya. Pada Provinsi Banten investasi dalam negeri terus mengalami pertumbuhan yang positif dalam rentang tahun 2016 hingga 2020 dikarenakan iklim investasi yang mendukung. Pada DI Yogyakarta lebih rendah dari semua provinsi di Pulau Jawa dikarenakan masalah seperti keterbatasan lahan, kurang optimalnya pengembangan kawasan industri dan lain sebagainya.

Dalam penelitian Desmintari dkk (2020) menunjukkan ekspansi ekonomi didorong secara signifikan oleh investasi dalam negeri. Namun, studi oleh Sartika et al. (2001) menunjukkan penanaman modal dalam negeri tak banyak berdampak atas pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, pengeluaran pemerintah mempunyai dampak dan pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah ialah unit dari kebijakan fiskal yang pemerintah lakukan guna mengontrol laju perekonomian melalui memutuskan penerimaan serta pengeluaran pemerintah setiap tahunnya dapat dilihat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APDB). Kebijakan ini mempunyai tujuan untuk menstabilkan tingkat output, harga, dan kesempatan kerja serta menaikkan pertumbuhan ekonomi (Koyongian et al., 2019).

Grafik 2. PDRB ADHK dan Pengeluaran Pemerintah di Pulau Jawa Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Dari grafik 2 dapat dilihat bahwa terjadi fenomena pada tahun 2020 pada provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Banten terjadi kenaikan pada pengeluaran pemerintah, namun kenaikan tersebut tidak disertai dengan kenaikan PDRB masing-masing provinsi tersebut. Kenaikan pengeluaran tersebut terjadi karena terjadi lonjakan pada pengeluaran tidak terduga dan belanja infrastruktur sedangkan PDRB ketiga provinsi tersebut sedang menurun pada tahun 2020 karena adanya Covid-19 yang mengakibatkan perlambatan ekonomi (BPS, 2020). Fenomena tersebut diduga bertentangan dengan teori Keynes yang mengemukakan kalau pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari unsur permintaan agregat melalui pendekatan sistem perekonomian terbuka. Dengan pendekatan tersebut dapat disimpulkan dari masa ke masa besarnya peranan pengeluaran pemerintah dalam membentuk pendapatan daerah. Sehingga diharapkan pengeluaran pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

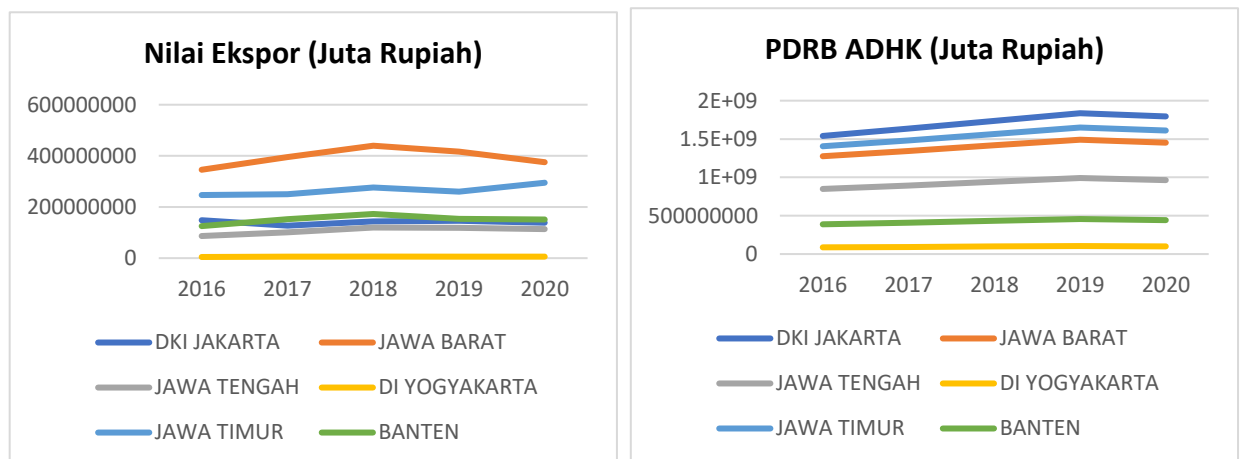
Pengeluaran pemerintah terbesar di Pulau Jawa terletak di Provinsi DKI Jakarta dikarenakan DKI Jakarta merupakan ibukota negara dan pengeluaran paling banyak bersumber dari belanja langsung. Pada Jawa Barat belanja langsung dan tidak langsung mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19. Pada empat Provinsi lainnya yakni Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, dan DI

Yogyakarta pertumbuhan pengeluaran dari tahun 2016 hingga 2020 terus mengalami peningkatan namun peningkatan tersebut tidak besar dan tidak ada lonjakan.

Dalam penelitian Endang dkk (2019) dan Zulfa dkk (2021) menunjukkan pengeluaran pemerintah punya dampak signifikan positif atas pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian suatu negara sangat bergantung pada ekspor. Ekspor akan menghasilkan mata uang asing yang dapat dipakai untuk membayar impor peralatan modal dan bahan baku yang dibutuhkan guna pembuatan barang dengan nilai tambah. Pertumbuhan ekspor dianggap sebagai faktor utama dalam bertumbuhnya lapangan pekerjaan dan produksi. Berikut grafik ekspor provinsi di Pulau Jawa :

Grafik 3. PDRB ADHK dan Ekspor di Pulau Jawa Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)



Sumber : BPS dan Kementerian Perdagangan, 2022

Berdasarkan grafik di atas terdapat beberapa fenomena yang terjadi, salah satu fenomenanya adalah ekspor DKI Jakarta pada tahun 2017 mengalami penurunan, namun penurunan ekspor tersebut tidak diiringi dengan penurunan PDRB. Hal tersebut diduga bertentangan dengan teori *post neoclassical* atau *endogenous economic growth* oleh Paul Romer (1986) yang menyebutkan ekspor punya dampak positif atas *output* serta pertumbuhan ekonomi (Ginting, 2017). Penurunan ekspor DKI Jakarta tahun 2017 terjadi karena penurunan ekspor nonmigas yang telah terjadi dari 2015 hingga 2017 (BPS, 2018). Fenomena selanjutnya terjadi pada tahun 2020 dimana ekspor Provinsi Jawa

Timur mengalami peningkatan karena peningkatan kinerja ekspor sektor migas dan non migas namun tidak disertai peningkatan PDRBnya. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2020 semua PDRB di Pulau Jawa mengalami penurunan akibat dari adanya Covid-19.

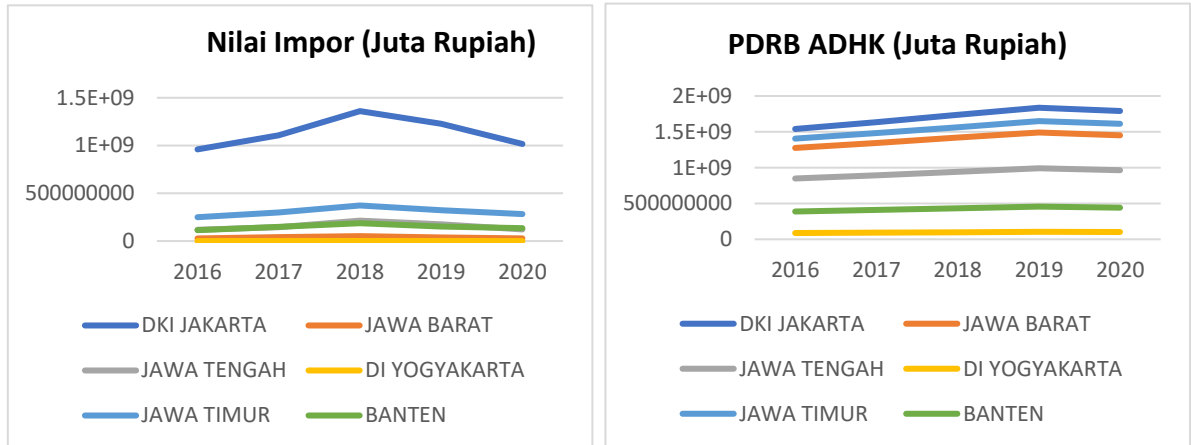
Secara keseluruhan ekspor Indonesia masih didominasi oleh Pulau Jawa dengan ekspor terbesar berasal dari Jawa Barat. Ekspor Jawa Barat didominasi kendaraan, komoditas hasil sektor industri pengolahan, sektor migas, sektor pertanian dan sektor lainnya. Ekspor pada DKI Jakarta didominasi dari produk-produk nonmigas dan penyumbang terbanyak adalah dari industri pengolahan. Sedangkan pada DI Yogyakarta ekspor sektor pertanian dan industri pengolahan dengan komoditas terbanyak berasal dari pakaian jadi bukan rajutan, perabot, penerangan rumah dan barang-barang rajutan. Kinerja ekspor pada Banten selama lima tahun dari 2016 hingga 2020 mempunyai nilai yang cukup baik meski di tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan dengan didominasi komoditas nonmigas. Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren yang meningkat pada ekspor selama lima tahun terakhir dengan tujuan terbesar ke negara Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Jawa Tengah mempunyai kecenderungan tren ekspor meningkat dengan didominasi barang nonmigas dengan urutan pertama pakaian jadi bukan rajutan kemudian disusul barang-barang rajutan dan kayu.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dedi dkk (2020), Rinaldy (2017), Ismadiyah dkk (2018), Muhammad dkk (2018), Bader (2016), dan Zulfa dkk (2021) menunjukkan ekspor berdampak substansial positif akan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, dalam penelitian Endang dkk (2019) dan Dwi (2017) menunjukkan ekspor tidak punya dampak signifikan atas pertumbuhan ekonomi.

Selain ekspor, ada kegiatan impor guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan impor menunjukkan tingkat konsumsi sejalan dengan pendapatan dan sejauh mana masyarakat di suatu negara bergantung pada barang dan jasa yang mereka butuhkan karena tidak mampu memproduksi dan memenuhi permintaan konsumen. Dari sisi impor dan tingkat pendapatan, nilai impor yang besar mencerminkan kesejahteraan masyarakat yang distimulus

oleh pertumbuhan ekonomi yang baik di negara tersebut sehingga masyarakatnya mampu untuk mengimpor produk dari luar negeri. Berikut grafik impor provinsi di Pulau Jawa :

Grafik 4. PDRB ADHK dan Impor di Pulau Jawa Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)



Sumber : BPS dan Kementerian Perdagangan, 2022

Grafik diatas menunjukkan adanya fenomena yang terjadi pada tahun 2019 dimana semua provinsi di Pulau Jawa merasakan penurunan impor, namun penurunan impor tersebut tidak diikuti oleh penurunan PDRB. PDRB di Pulau Jawa pada tahun 2019 mengalami kenaikan pada semua provinsi. Penurunan impor tersebut terjadi karena turunnya volume impor migas nasional dan nonmigas nasional. Kemudian pada tahun 2020 terjadi fenomena pada provinsi DI Yogyakarta dimana impor mengalami kenaikan dikarenakan impor dari lima negara asal barang mengalami kenaikan namun PDRB DI Yogyakarta pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan Covid-19. Kedua fenomena tersebut diduga bertentangan dengan David Ricardo (1971) dalam teori keunggulan komparatif yang menyebutkan bahwa di dalam perdagangan internasional termasuk impor didalamnya dapat saling menguntungkan dan mendorong pendapatan negara apabila satu diantara negara terkait tidak mempunyai keunggulan yang absolut, hanya dengan mempunyai keunggulan komparatif di harga untuk komoditas yang berbeda.

Impor tertinggi di Pulau Jawa berasal dari DKI Jakarta yang terdiri dari migas dan nonmigas dengan didominasi oleh barang nonmigas. Mesin-mesin atau pesawat mekanik menjadi barang diimpor paling banyak pada DKI Jakarta

dan menempati urutan pertama sebanyak 20,17% impor Jakarta tahun 2020. Impor Jawa Barat dalam lima tahun terakhir cenderung menurun dan didominasi oleh komoditas minyak petroleum mentah dan bahan bakar motor. Pada DI Yogyakarta impor terbanyak berasal dari golongan barang lokomotif dan peralatan kereta api dan filamen buatan dengan asal barang terbanyak dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Hongkong. Provinsi Banten menunjukkan kontribusi yang signifikan pada impor Indonesia dalam kurun lima tahun terakhir Banten menyumbang sekitar lima persen terhadap impor Indonesia. Pada Jawa Timur biarpun sempat merasakan penurunan pada 2016 tetapi 2017 dan 2018 mengalami kenaikan. Impor terbesar Jawa Timur berasal dari Tiongkok dari tahun 2019 hingga 2020 didominasi oleh bawang putih dan buah pir segar. Pada Jawa Tengah dalam kurun 2016 hingga 2020 nilai impor non migas lebih besar daripada migas dengan didominasi oleh impor bahan baku/penolong.

Dalam penelitian Bader (2016) memperlihatkan kalau impor mempunyai dampak yang substansial positif kepada pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, dalam riset Ismadiyahanti (2018) menunjukkan impor tak berdampak signifikan kepada pertumbuhan ekonomi.

Riset lain telah dilaksanakan sebelumnya yang membahas tentang pengaruh investasi dalam negeri, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor kepada pertumbuhan ekonomi seperti penelitian dari Desmintari dan Lina Aryani (2020), Dedi Supiyadi dan Lia Puspa Anggita (2020), Rinaldi Syahputra (2017), Ismadiyahanti dkk.(2018), Surtika dkk.(2021), Endang dkk (2019), Muhammad dkk (2018), Najeh dkk (2019), Dwi Kartikasari (2017), Bader S.S. Hamdan (2016), Saadah dkk (2019), dan Zulfa dkk (2019) memperlihatkan kalau variabel-variabel bebas yang dipakai punya pengaruh kepada variabel terikat, yaitu pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan deskripsi di atas, peneliti ingin menguraikan dan melakukan penelitian faktor-faktor yang diyakini berpengaruh atas pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Sehingga didapat judul studi yang akan diangkat adalah “Analisis Sisi Permintaan Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa”.

I.2 Perumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi menjadi masalah jangka panjang dan dihadapi oleh seluruh daerah. Pulau Jawa mempunyai PDRB tertinggi jika dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Artinya, perekonomian Indonesia bergantung pada PDRB Pulau Jawa. Sehingga perekonomian yang tinggi ini seharusnya menggerakkan kegiatan perekonomian yang lain seperti investasi dalam negeri, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor. Namun kenyataannya PDRB yang tinggi tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekspor, impor, investasi dalam negeri, dan pengeluaran pertumbuhan yang baik. Berdasarkan uraian tersebut, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh investasi dalam negeri kepada pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa?
- 2) Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah kepada pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa?
- 3) Bagaimana pengaruh ekspor kepada pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa?
- 4) Bagaimana pengaruh impor kepada pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa?

I.3 Tujuan Penelitian

Didasarkan dari uraian rumusan masalah, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memahami pengaruh investasi dalam negeri kepada pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa.
2. Untuk memahami pengaruh pengeluaran pemerintah kepada pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa.
3. Untuk memahami pengaruh ekspor kepada pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa.
4. Untuk memahami pengaruh impor kepada pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan deskripsi tersebut, riset ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu menyumbang masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait sisi permintaan pertumbuhan

ekonomi. Kajian ini juga diharapkan menjadi salah satu wadah bagi lebih banyak peneliti, termasuk peneliti dari perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan LSM lainnya, untuk fokus pada isu pertumbuhan ekonomi.

2. Aspek Praktis

- a) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa menyediakan informasi dan wawasan mengenai keputusan pertumbuhan ekonomi Jawa dan dapat dipergunakan sebagai bahan pembelajaran.
- b) Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini mampu menyediakan penjelasan dan wawasan terkait pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa yang bisa dijadikan sebagai acuan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan memecahkan masalah.